

Perluasan Kesempatan Kerja dengan Pengembangan Agroindustri di Daerah Kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Expansion of Employment Opportunities by Agroindustry Development in Indonesian Migrant Workers Areas

Yeni Nuraeni

Centre for Labor Research and Development, Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia,
Jl. Gatot Subroto 51, South Jakarta 12780, Indonesia
yeninur@hotmail.com

Received: 01st September, 2018; 1st Revision: 02nd April, 2019; 2nd Revision: 08th April, 2019; Accepted: 11th June, 2019

Abstrak

Moratorium pembatasan pengiriman TKI sektor informal terutama ke negara-negara di Kawasan Timur Tengah dilakukan sejak tahun 2011 dengan alasan perlindungan yang sangat sulit dilakukan. Hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi calon-calon TKI yang tidak bisa lagi mencari kerja di luar negeri dan sulit mendapatkan pekerjaan di dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang pengembangan Agroindustri di daerah-daerah Kantong TKI. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Kesempatan Kerja di Kabupaten dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ) untuk menentukan sektor basis. Kesimpulan dari penelitian diperoleh bahwa kesempatan kerja di sektor pertanian memiliki kecenderungan terus menurun dan digantikan oleh sektor industri. Pengembangan agroindustri merupakan salah satu pemecahan masalah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja di dalam negeri khususnya bagi masyarakat yang berpendidikan rendah sehingga dapat mengurangi minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri di sektor yang tidak berbadan hukum. Pemanfaatan komoditi unggulan, pemberdayaan dan peningkatan pendidikan/keterampilan masyarakat merupakan solusi untuk pengembangan agroindustri di daerah Kantong TKI dalam rangka perluasan kesempatan kerja.

Kata Kunci: agroindustri, pemberdayaan, tenaga kerja Indonesia

Abstract

There has been a moratorium on restrictions on the delivery of Indonesian migrant workers since 2011, especially to countries in the Middle East Region with the reason of the difficulties in safety protection. This moratorium raises new problems for prospective labor migrants who can no longer seek employment abroad and difficult to find work in the country. This study aims to examine the opportunities for Agro-industry development in the areas of the Indonesian Migrant Workers. The study uses quantitative analysis of Gross Regional Domestic Product (GRDP) and Employment Opportunities in the District by using the LQ method to determine the base sector. The conclusion of the research shows that employment opportunities in the agricultural sector tend to decline. It is replaced by the industrial sector. Agro-industry development is one of the solutions that can be offered by the government to provide jobs in the country specifically for low-educated people, so as can reduce the interest of the community to work abroad in the informal sector. Utilization of superior commodities, empowerment, and improvement of education/community skills are solutions for the development of agro-industries in the area of Indonesian migrant workers in the framework of expanding employment opportunities.

Keywords: agroindustry, empowerment, Indonesian migrant workers

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk salah satu negara pengirim tenaga kerja ke luar negeri terbesar di kawasan Asia, di samping negara-negara lainnya seperti Filipina, Thailand, India dan Bangladesh. Salah satu faktor dominan penyebab terjadinya mobilitas tenaga kerja Indonesia ke luar negeri

adalah alasan ekonomi. Indonesia memiliki tenaga kerja berlebih dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia sehingga perlu mencari solusi untuk dapat menurunkan tingkat pengangguran diantaranya dengan mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Salah satu daya tarik bagi angkatan kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri adalah lebih tingginya upah yang diterima

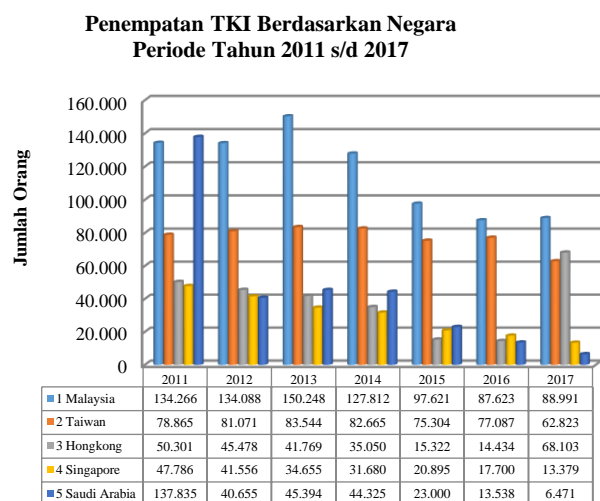
dibandingkan bila mereka bekerja di dalam negeri. Faktor pendorong lain yang menyebabkan tingginya minat untuk bekerja di luar negeri adalah kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yaitu tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Lapangan kerja di sektor informal yang tersedia memiliki tingkat produktifitas yang rendah dan tingkat upah yang rendah pula, sehingga meningkatkan daya tarik untuk bekerja ke luar negeri.

Beberapa wilayah yang menjadi pengirim terbesar TKI ke luar negeri dan dikenal dengan istilah "Daerah Kantong TKI". Kabupaten/Kota yang merupakan wilayah Kantong TKI terbesar pada tahun 2014 s/d 2017 dapat dilihat pada Tabel 1. Sebagian besar TKI berasal dari Jawa Barat yaitu terdapat 5 kabupaten yang masuk ke daerah 21 pengirim TKI terbanyak selama tahun 2014 s/d 2017.

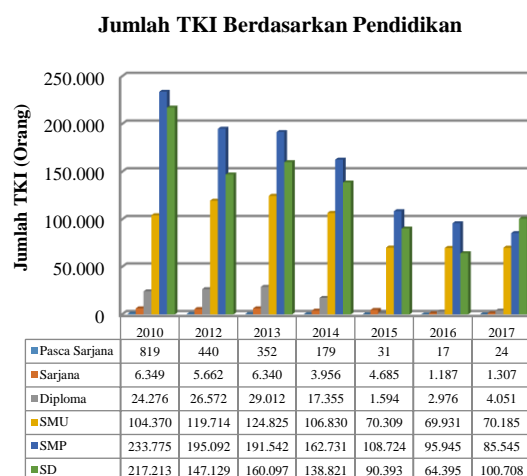
Tabel 1. Penempatan TKI berdasarkan kabupaten/kota periode tahun 2014 s/d 2017

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	Lombok Timur	29.510	25.772	19.274	15.230
2.	Indramayu	25.521	19.025	16.625	17.618
3.	Lombok Tengah	14.109	12.175	10.907	9.800
4.	Cirebon	15.786	10.953	10.078	10.170
5.	Cilacap	16.013	10.753	9.574	10.128
6.	Ponorogo	8.869	6.443	6.597	9.075
7.	Subang	8.357	7.254	6.522	7.853
8.	Kendal	11.212	7.581	6.391	7.431
9.	Blitar	7.973	5.209	4.815	8.426
10.	Malang	8.114	3.873	3.348	8.238
11.	Lampung Timur	7.582	6.692	5.994	5.453
12.	Tulungagung	6.723	5.091	4.692	6.129
13.	Lombok Barat	7.472	6.871	5.191	4.418
14.	Banyuwangi	7.271	4.876	4.039	5.129
15.	Brebes	8.216	5.292	4.310	4.811
16.	Madiun	5.185	3.525	3.401	4.644
17.	Banyumas	5.642	3.819	3.522	3.764
18.	Pati	5.267	3.399	3.387	3.415
19.	Majalengka	5.563	3.593	3.235	2.851
20.	Kediri	4.570	2.773	2.426	3.585
21.	Karawang	8.499	3.097	2.749	3.098

Sumber: BNP2TKI (2019)



(a)



(b)

Gambar 1. Lima Negara Tujuan TKI Terbanyak (a) dan Jumlah TKI Berdasarkan Tingkat Pendidikan (b)

Negara tujuan pengiriman tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh negara Malaysia, Taiwan, Hongkong, Singapore & Saudi Arabia (Gambar 1). Sebagian besar TKI bekerja pada jenis-jenis pekerjaan yang berstatus rendah, seperti buruh di sektor pertanian, perkebunan, konstruksi serta sektor jasa seperti pengemudi, pelayan toko dan pembantu rumah tangga (PRT). Banyaknya TKI yang bekerja di sektor informal/formal yang berpendidikan rendah (\leq SMP), mengundang banyak permasalahan terutama menyangkut perlindungan terhadap hak-haknya sebagai pekerja serta kondisi kerja eksploitatif di luar negeri.

Salah satu upaya pemerintah dalam mencegah dan meminimalkan permasalahan penempatan TKI ke luar negeri yaitu dengan pengurangan penempatan TKI sektor informal/formal yang berpendidikan rendah (SD dan SMP). Berdasarkan data dari BNP2TKI (2019) (Gambar 1) TKI yang berpendidikan SD dan SMP berkisar antara 60%-70% dari total TKI yang ditempatkan pada periode tahun 2010 s/d 2017. Sering terjadinya permasalahan yang dihadapi TKI (khususnya berpendidikan rendah) pemerintah perlu lebih meningkatkan penempatan TKI di sektor formal (pengguna berbadan hukum) dan memiliki keterampilan yang cukup, dengan cara meningkatkan kualitas TKI yang akan ditempatkan dan mengurangi kuota pengiriman TKI non formal (pengguna perseorangan). Kebijakan tersebut perlu didukung dengan upaya pemerintah menyusun strategi penyediaan berbagai alternatif lapangan pekerjaan dan memberi kesempatan bagi pengembangan berbagai industri di dalam negeri. Diharapkan hal tersebut dapat mengurangi minat warga Negara Indonesia untuk menjadi TKI khususnya di sektor informal/formal yang berpendidikan rendah.

Terdistribusinya persentasi nilai tambah bruto sektoral sebagai penyusun perekonomian wilayah dapat menjadi indikator untuk menilai keunggulan dan potensi suatu daerah. Sumber daya lokal yang dimiliki oleh suatu daerah maupun aktivitas ekonomi yang berpotensi untuk melibatkan dan menghidupi masyarakat setempat akan menentukan tingkat pembangunan ekonomi daerah tersebut. Keberlanjutan ketersediaan sumber dana pembangunan dan peningkatan kinerja perekonomian daerah dapat terjamin dengan adanya pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah (Husain Syam *et al.*, 2006).

Salah satu alternatif untuk memajukan per-

ekonomian nasional maupun regional di Indonesia adalah dengan melakukan pergeseran pembangunan dari sektor pertanian ke sektor industri (Halil, 2003). Potensi yang cukup besar pada sektor pertanian Indonesia memungkinkan untuk pengembangan agroindustri yang bertujuan menjaga keterkaitan antara sektor pertanian dan sektor industri. Pengembangan agroindustri khususnya di pedesaan, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah, pendapatan, mutu hasil pertanian dan perluasan kesempatan kerja. Permasalahan surplus tenaga kerja di sektor pertanian dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi diharapkan dapat diatasi dengan pengembangan agroindustri khususnya di daerah pedesaan (Djamudin *et al.*, 2012).

Strategi pengembangan wilayah menggunakan pendekatan dengan melihat sumberdaya dan keunggulan komparatif merupakan karakteristik pengembangan agroindustri yang memiliki sifat *resource-based industries* (Syam & Ma'arif, 2004). Prinsip mengembangkan agroindustri di wilayah pedesaan adalah melihat sumberdaya alam yang menjadi komoditas unggulan (prioritas untuk menjaga kontinuitas ketersediaan bahan baku) serta memudahkan/memperpendek jalur distribusi paska panen (berdampak pada kebutuhan tenaga kerja dan meningkatnya pendapatan petani). Pengembangan agribisnis dan industri pengolahan akan berdampak terhadap mata pencaharian masyarakat yang tidak terbatas hanya pada sektor primer, tetapi bisa berkembang sampai sektor sekunder yang dapat memicu tumbuhnya pusat-pusat ekonomi disekitarnya (Silva & Riadi, 2006). Strategi pengembangan agroindustri bertujuan untuk memotivasi komunitas petani dan pelaku agroindustri untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, penerapan ilmu dan teknologi. Dampak ganda yang diharapkan adalah kelancaran proses produksi dan peningkatan nilai produk, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Soejono, 2011).

Terdapat faktor-faktor penting dalam sistem perekonomian pedesaan untuk menjaga keterkaitan antar sektor, khususnya sektor pertanian, industri, perdagangan serta sektor lain (Arumsari & Syamsiar, 2011). Tujuan dari proses industrialisasi pada agroindustri adalah peningkatan nilai ekonomi dari produk hasil pertanian primer menjadi produk olahan yang diharapkan pada akhirnya mampu memperkuat ekonomi regional. Visa dari industrialisasi pertanian harus didukung oleh

pertanian primer (*on farm agribusiness*) dalam menghasilkan bahan baku atau bahan jadi yang siap dikonsumsi (Halil, 2003). Pengembangan agroindustri berpotensi tinggi menimbulkan dampak sosial ekonomi berupa peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pengalaman di negara-negara maju, sebesar 14% tenaga kerjanya telah berpartisipasi aktif dalam pemrosesan agroindustri secara langsung maupun tidak langsung (Dhiman & Rani, 2011).

Pentingnya pengembangan sektor agroindustri diantaranya bisa berdampak pada peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja dan pendapatan rumah tangga (Sinaga & Susilowati, 2007). Saat ini kinerja sektor pertanian secara *on farm* tidak dapat diandalkan lagi sehingga perlu mencari alternatif solusi untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian yaitu dengan pengembangan agroindustri (Setyowati, 2012). Pengembangan agroindustri merupakan solusi yang paling tepat untuk menjaga keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dalam jangka panjang. Penempatan agroindustri sebagai sektor unggulan dapat menjadi pilihan utama dalam pengembangan strategi dan kebijakan pembangunan pedesaan sehingga diharapkan dapat mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar (Maharani, Edwina, & Kusumawaty, 2010). Menurut Yulianti & Sari (2008), "lingkup pengembangan agribisnis tidak hanya mencakup pertanian primer (*on farm agribusiness*) tetapi juga mencakup industri penghasil sarana produksi (*up stream agribusiness*), pengolah hasil pertanian primer dan kegiatan perdagangan (*down stream agribusiness*)".

Permasalahan yang banyak terjadi di daerah pertanian di Indonesia yaitu masih ditemukan tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang pengembangan agroindustri di kantong TKI terbesar di Provinsi Jawa Barat dalam rangka perluasan kesempatan kerja di dalam negeri. Tersedianya lapangan kerja yang lebih luas diharapkan dapat mengurangi minat masyarakat setempat sebagai pekerja migran di sektor informal yang memiliki tingkat perlindungan sangat minim.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah deskriptif analitik. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik survei yaitu proses pengumpulan informasi dilakukan dengan interview yang sangat terstruktur (Cooper & Schindler, 2006). Pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu/*purposive sampling*. Sampel yang diambil sebagai daerah survei adalah empat Kabupaten pengirim TKI terbanyak di Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Indramayu, Karawang, Subang, Cirebon dan Majalengka. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

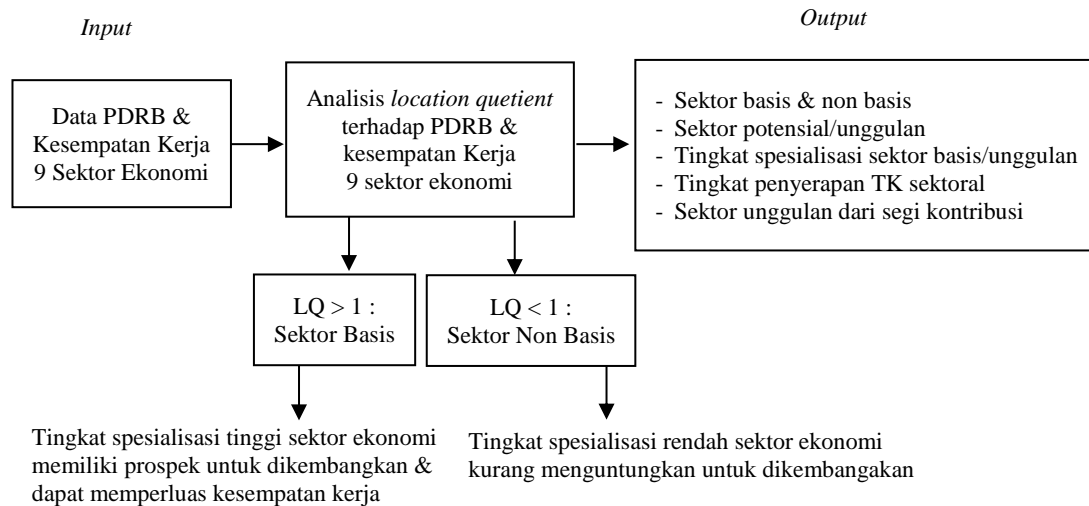
1. Pengumpulan data sekunder berupa PDRB dan Kesempatan Kerja Kabupaten yang diambil sebagai sampel. Data yang diambil berupa data series selama lima tahun (2008 s/d 2013).
2. Melakukan analisis kuantitatif terhadap data PDRB dan Kesempatan Kerja Kabupaten dengan menggunakan metode LQ. Berdasarkan hasil analisis LQ akan diketahui apakah sektor pertanian masih merupakan sektor unggulan dan berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka perluasan kesempatan kerja.
3. Tahapan observasi lapangan dilakukan untuk mendalami hasil analisis LQ. Dari hasil observasi lapangan diketahui komoditi unggulan yang berpotensi untuk pengembangan agroindustri.
4. Tahapan wawancara mendalam terhadap instansi/lembaga terkait dilakukan untuk merumuskan strategi yang dapat digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mendukung pengembangan agroindustri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Sektor Basis/Unggulan

Penggunaan metode *Location Quotient* (LQ) dalam model ekonomi basis bertujuan untuk memahami faktor yang menjadi pemicu pertumbuhan yaitu sektor kegiatan dari PDRB atau Kesempatan Kerja Kabupaten/Kota di daerah kantong TKI. Hasil metode LQ dapat digunakan untuk mengkaji kondisi perekonomian suatu daerah dengan mengarah pada proses identifikasi spesialisasi/basis kegiatan perekonomian. Nilai LQ yang diperoleh dapat dijadikan acuan untuk menentukan sektor basis yang merupakan sektor pendorong tumbuhnya atau berkembangnya sektor lain serta berdampak pada penciptaan lapangan kerja. *Input* dan *output* dari analisis LQ dapat dilihat pada Gambar 2.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan *Location Quotient* (LQ) seperti terlihat



Gambar 2. *Input dan Output Analisis Location Quotient* (Nuraeni, 2018)

pada Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa di masing-masing daerah Kantong TKI Sektor Pertanian pada umumnya masih menjadi sektor basis/unggulan kompetitif kecuali di Kabupaten Karawang nilai LQ sektor pertanian bukan merupakan sektor basis karena Karawang sudah bergerak ke arah daerah perindustrian.

Walaupun sektor pertanian pada umumnya masih merupakan sektor unggulan dan memiliki prospek untuk dikembangkan dalam rangka perluasan kesempatan kerja, tetapi minat masyarakat setempat untuk mengisi lowongan kerja di sektor pertanian makin menurun. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat khususnya yang berpendidikan rendah hanya mampu bekerja sebagai buruh tani dengan upah yang relatif kecil.

Daerah-daerah kantong TKI, yang sektor industri pengolahannya sudah berkembang dengan cukup pesat dan sudah masuk kategori sektor unggulan seperti di Kabupaten Karawang, sektor ini dapat menyediakan kesempatan kerja yang cukup luas bagi masyarakat setempat. Terlebih didukung oleh kebijakan pemerintah daerah berkaitan pemberian kuota penyerapan tenaga kerja lokal bagi perusahaan-perusahaan besar. Masyarakat berpendidikan rendah sulit untuk mengisi lowongan kerja di sektor industri pengolahan yang umumnya perusahaan besar dengan penggunaan teknologi tinggi dan membutuhkan sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang memadai. Permasalah inilah yang mengakibatkan minat masyarakat tetap tinggi untuk dapat bekerja sebagai TKI di sektor informal dengan tingkat perlindungan yang minim.

Komoditi Unggulan di Daerah Kantong TKI

Pengembangan agroindustri kantong TKI adalah pengolahan hasil pertanian komoditi unggulan di tiap daerah menjadi produk olahan yang bernilai ekonomi. Pengembangan agroindustri merupakan salah satu alternatif untuk memberi peluang kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat lokal. Penyediaan lapangan kerja bagi penduduk pedesaan dapat diupayakan melalui pengembangan industri kecil dengan cara pemberdayaan agroindustri. Pengembangan dan pengelolaan yang baik, agroindustri memiliki prospek untuk membantu petani mewujudkan tujuannya dalam meningkatkan kualitas hidupnya (Maharani *et al.*, 2010). Pengembangan agroindustri di daerah Kantong TKI dapat memberi keuntungan bagi masyarakat setempat berupa:

1. Pemberdayaan masyarakat di daerah Kantong TKI yang berbasiskan kepada potensi lokal/komoditi unggulan untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah berdasarkan sumberdaya yang dimilikinya sehingga hasil pertanian di dalam negeri memiliki nilai tambah yang lebih besar.
2. Meningkatkan pendapatan dan memperluas lapangan kerja sehingga sektor pertanian masih memberikan daya tarik bagi masyarakat setempat. Berkembangnya agroindustri memberi kesempatan bagi masyarakat tidak hanya sebagai pekerja/buruh di sektor pertanian, tetapi memberi peluang untuk dapat memiliki usaha sendiri. Selain itu, dapat memberi peluang bagi tenaga kerja untuk beralih dari sektor

Tabel 2. Nilai LQ per kabupaten untuk penentuan sektor unggulan

Sektor	Tahun					Rata-rata LQ	Keunggulan Kompetitif	
	2008	2009	2010	2011	2012			
Kabupaten Indramayu								
Pertanian	1,62	1,49	1,55	1,62	1,69	1,75	1,62	Unggulan
Pertambangan dan Penggalian	13,62	12,60	12,84	14,25	18,46	18,91	15,11	Unggulan
Industri Pengolahan	0,43	0,46	0,47	0,46	0,36	0,35	0,42	non Unggulan
Listrik, gas dan air bersih	0,20	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,20	non Unggulan
Bangunan	0,45	0,44	0,40	0,43	0,52	0,58	0,47	non Unggulan
Perdagangan, hotel dan restoran	0,81	0,84	0,87	0,90	0,88	0,89	0,87	non Unggulan
Pengangkutan dan Komunikasi	0,85	0,81	0,74	0,70	0,69	0,74	0,76	non Unggulan
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	0,46	0,45	0,43	0,40	0,41	0,43	0,43	non Unggulan
Jasa-jasa	0,71	0,70	0,68	0,66	0,63	0,66	0,67	non Unggulan
Kabupaten Karawang								
Pertanian	0,81	0,71	0,60	0,63	0,61	0,76	0,69	non Unggulan
Pertambangan dan Penggalian	1,86	1,60	1,55	1,56	1,58	2,13	1,71	Unggulan
Industri Pengolahan	1,06	1,13	1,18	1,17	1,21	1,21	1,16	Unggulan
Listrik, gas dan air bersih	1,34	1,29	1,30	1,40	1,39	1,31	1,34	Unggulan
Bangunan	0,65	0,64	0,59	1,19	1,26	0,77	0,85	non Unggulan
Perdagangan, hotel dan restoran	1,01	1,00	1,01	0,94	0,87	0,88	0,95	non Unggulan
Pengangkutan dan Komunikasi	0,86	0,83	0,65	0,55	0,50	0,57	0,66	non Unggulan
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	0,49	0,48	0,55	0,52	0,61	0,48	0,52	non Unggulan
Jasa-jasa	1,00	0,97	1,05	0,98	1,01	0,98	1,00	non Unggulan
Kabupaten: Subang								
Pertanian	2,40	2,18	2,26	2,39	2,48	2,51	2,37	Unggulan
Pertambangan dan Penggalian	4,95	4,68	4,89	5,25	6,16	6,36	5,38	Unggulan
Industri Pengolahan	0,31	0,33	0,34	0,35	0,37	0,39	0,35	non Unggulan
Listrik, gas dan air bersih	0,55	0,50	0,50	0,53	0,50	0,54	0,52	non Unggulan
Bangunan	0,80	0,81	0,76	0,72	0,66	0,66	0,74	non Unggulan
Perdagangan, hotel dan restoran	1,15	1,11	1,07	1,07	1,03	1,01	1,08	Unggulan
Pengangkutan dan Komunikasi	1,20	1,16	1,07	0,99	0,93	0,90	1,04	Unggulan
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	1,32	1,33	1,28	1,22	1,18	1,16	1,25	Unggulan
Jasa-jasa	1,23	1,23	1,19	1,17	1,15	1,17	1,19	Unggulan
Kabupaten: Cirebon								
Pertanian	2,36	2,22	2,30	2,38	2,46	2,54	2,38	Unggulan
Pertambangan dan Penggalian	0,17	0,16	0,17	0,19	0,22	0,24	0,19	non Unggulan
Industri Pengolahan	0,33	0,33	0,32	0,33	0,34	0,35	0,33	non Unggulan
Listrik, gas dan air bersih	1,03	0,95	0,95	1,02	1,00	1,05	1,00	Unggulan
Bangunan	2,16	2,14	2,03	1,95	1,83	1,88	2,00	Unggulan
Perdagangan, hotel dan restoran	1,16	1,11	1,06	1,05	1,01	0,92	1,05	Unggulan
Pengangkutan dan Komunikasi	1,39	1,33	1,25	1,17	1,13	1,13	1,23	Unggulan
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	1,39	1,36	1,34	1,29	1,26	1,26	1,31	Unggulan
Jasa-jasa	1,83	1,86	1,93	1,92	1,94	1,98	1,91	Unggulan
Kabupaten: Majalengka								
Pertanian	2,20	2,04	2,08	2,17	2,29	2,31	2,18	Unggulan
Pertambangan dan Penggalian	1,75	1,64	1,69	1,89	2,15	2,25	1,90	Unggulan
Industri Pengolahan	0,37	0,39	0,40	0,40	0,41	0,41	0,40	non Unggulan
Listrik, gas dan air bersih	0,33	0,30	0,31	0,34	0,34	0,34	0,33	non Unggulan
Bangunan	1,37	1,36	1,32	1,28	1,24	1,27	1,31	Unggulan
Perdagangan, hotel dan restoran	1,01	0,96	0,95	0,96	0,93	0,93	0,96	non Unggulan
Pengangkutan dan Komunikasi	1,53	1,48	1,36	1,27	1,19	1,14	1,33	Unggulan
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	1,83	1,79	1,74	1,65	1,60	1,58	1,70	Unggulan
Jasa-jasa	2,03	2,06	1,99	1,95	1,89	1,87	1,97	Unggulan

pertanian ke sektor industri hasil pertanian sehingga memberi peluang peningkatan terhadap upah yang diterima.

- Peningkatan nilai ekspor hasil agroindustri diharapkan dapat meningkatkan penerimaan devisa. Adapun berbagai komoditi unggulan yang potensial untuk dikembangkan di daerah Kantong TKI serta kebijakan pemerintah da-

erah yang mendukung pengembangan agroindustri dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kabupaten Indramayu

Jenis komoditi unggulan: mangga gincu singkong, nangka, perikanan tangkap. Agroindustri yang telah dikembangkan: industri sirup, keripik singkong & nangka, dodol mangga. Upaya pemerintah da-

erah dalam rangka pengembangan agroindustri:

- 1) Penyediaan lahan dan kawasan industri
- 2) Pemberian pelatihan dan alat-alat pengolahan kepada ibu-ibu dan pemuda untuk bisa mengembangkan industri rumahan
- 3) Pengupayaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan besar digunakan sebagai dana pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat

b. Kabupaten Karawang:

Jenis komoditi unggulan: jamur, buah kawista, ikan bandeng. Agroindustri yang telah dikembangkan: berbagai makanan olahan jamur, bandeng presto. Upaya pemerintah daerah dalam rangka pengembangan agroindustri:

- 1) Program *One Village One Product*
- 2) Kemudahan pendirian industri dengan sistem pelayanan satu pintu
- 3) Penyediaan Kawasan Industri

c. Kabupaten: Subang

Jenis komoditi unggulan: nanas, singkong, peternakan ayam. Agroindustri yang telah dikembangkan: berbagai makanan olahan dari nanas dan singkong. Upaya pemerintah daerah dalam rangka pengembangan agroindustri:

- 1) Area pertanian produktif tetap dijaga dari pengembangan lahan untuk industri
- 2) Dalam RT/RW tiap kecamatan ada zona industri tetapi tidak menghilangkan ciri khas Kabupaten Subang sebagai daerah agroindustri dan agrowisata
- 3) Memudahkan perijinan untuk pembangunan industri
- 4) Pelatihan kewirusahaan yang berkelanjutan

d. Kabupaten: Cirebon

Jenis komoditi unggulan: sapi, mangga ginju, rotan. Agroindustri yang telah dikembangkan: industri rotan. Upaya pemerintah daerah dalam rangka pengembangan agroindustri:

- 1) Mewujudkan kampung wirausaha dengan membentuk suatu wilayah berdasarkan basis potensi
- 2) Penciptaan Kampung Produktif
- 3) Peningkatan aksesibilitas UMKM

- 4) Pengembangan industri tematik
- 5) Perijinan usaha satu pintu

e. Kabupaten: Majalengka

Jenis komoditi unggulan: jagung, mangga. Agroindustri yang telah dikembangkan: makanan kecil. Upaya pemerintah daerah dalam rangka pengembangan agroindustri:

- 1) Pengembangan industri padat karya
- 2) Penciptaan wirausaha baru
- 3) Pengembangan kawasan industri
- 4) Kemudahan perijinan

Strategi Pengembangan Agroindustri di Daerah Kantong TKI

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya lokal adalah dengan mengembangkan agroindustri berbasis unggulan wilayah. Faktor utama yang akan menentukan kelangsungan operasional agroindustri diantaranya adalah kesiapan pihak-pihak yang berkaitan dengan sumber pembiayaan/pemodalannya baik perorangan maupun lembaga. Peran pemerintah dalam proses pengembangan agroindustri dapat bersifat positif untuk mengupayakan iklim usaha yang kondusif tetapi dengan intervensi yang berlebihan dapat memberikan dampak yang negatif (Mirah, 2008).

Keterbatasan teknologi yang dikuasai oleh pelaku usaha agroindustri dapat menjadi kendala dalam memenuhi kapasitas produksi yang dibutuhkan pasar, sehingga produsen tidak dapat memperoleh keuntungan maksimal (Wijayanti, Ethika, & Widyarini, 2007). Dalam pengembangan agroindustri diperlukan penggunaan teknologi yang memadai sehingga akan berdampak pada kebutuhan tingkat keterampilan tenaga kerja yang tinggi juga untuk menjamin keberhasilan usaha agro industri sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha maupun tenaga kerjanya (Wijayanti *et al.*, 2007). Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap lembaga/instansi terkait di setiap daerah Kantong TKI yang diambil sebagai sampel, masih terdapat berbagai kendala yang harus diatasi untuk dapat mengembangkan agroindustri sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pelatihan dan pembinaan kewirusahaan yang disertai proses pendampingan yang berkelanjutan sampai masyarakat bisa berwirausaha secara mandiri.
2. Lembaga pendidikan kejuruan dan lembaga pelatihan keterampilan negeri maupun swasta sangat sedikit yang berkaitan dengan bidang pertanian dan industri pertanian.

3. Kurikulum dalam pendidikan formal maupun pendidikan vokasi yang berlaku pada umumnya belum memadai untuk dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil dari segi teknis, manajerial maupun sosial. Hal ini menyebabkan transformasi dari sektor usaha tradisional (berfokus pada produk bahan mentah) ke sektor modern (berfokus untuk memberikan nilai tambah dan perluasan kesempatan kerja) belum terjamin.
4. Belum dilakukan identifikasi dan pemetaan produk unggulan secara menyeluruh.
5. Pemerintah belum memberikan jaminan pemasaran produk hasil agroindustri khususnya bagi UMKM.
6. Pengembangan sistem inkubator bisnis belum dilakukan secara luas di lembaga pendidikan formal maupun lembaga pelatihan keterampilan.
7. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai untuk dapat mendukung pengembangan agroindustri misalnya sistem irigasi, alat-alat pertanian yang modern.
8. Luas lahan pertanian yang dimiliki petani pada umumnya sangat terbatas sehingga sangat sulit untuk dapat menghasilkan komoditi pertanian yang memadai bagi pengembangan agroindustri
9. Produk yang dihasilkan berkualitas rendah karena masih menggunakan teknologi yang sederhana dalam mengolah hasil pertanian
10. Agroindustri yang banyak dikembangkan di daerah Kantong TKI masih berskala kecil/rumah dengan karakteristik tingkat pendapatan dan modal relatif rendah sehingga industri rumah tangga ini umumnya bersifat sementara.
11. Dukungan agroindustri skala besar/ sedang terhadap agroindustri skala kecil/rumah tangga dalam bentuk kemitraan belum berkembang luas.

Pada era globalisasi saat ini persaingan pasar semakin ketat. Industri yang mampu menghasilkan produk-produk berkualitas yang akan mampu bertahan dan laku di pasaran (Marimin & Muspitawati, 2002). Langkah yang harus dilakukan oleh suatu industri adalah terlebih dahulu mengetahui jenis produk yang diminta oleh pasar, selanjutnya menentukan teknik produksi yang dapat menghasilkan produk sesuai dengan harapan pelanggan dan memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan produk perusahaan sejenis (Marimin & Muspitawati, 2002). Berbagai kebijakan penting dapat diadopsi dari negara-negara yang telah berhasil mengembangkan sektor per-

tanian dan industri pertanian seperti negara Thailand, India dan Jepang (Dabukke & Iqbal, 2016) di antaranya sebagai berikut:

1. Negara Thailand
 - a. Pembinaan petani berbasis pengetahuan baik teknologi maju maupun tradisional.
 - b. Dalam rangka peningkatan produktivitas lahan dan efisiensi mekanisasi pertanian, pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan sistem kepemilikan lahan yang rata dan hak waris.
 - c. Dalam rangka mengupayakan keseragaman *output*, kemudahan pasca panen, meningkatkan daya saing ekspor serta mengendalikan penyakit tanaman, Pemerintah Thailand memberlakukan kebijakan pola monokultur dan berfokus pada jenis spesies bibit unggul secara terbatas.
 - d. Pemerintah Thailand memberi jaminan kepada petani untuk bisa hidup layak dengan melindungi harga jual produk pertanian di pasar lokal sehingga petani mampu membeli barang-barang *input* seperti pupuk, obat-obatan, air, bibit unggul, sewa mesin pertanian dan lainnya.
 - e. Kebijakan pemerintah Thailand untuk memberi akses yang mudah dan terjangkau pada petani dalam memperoleh pupuk dengan sistem monopoli pupuk impor oleh BUMN serta distribusikan secara nasional. Pupuk impor yang telah dicampur dengan bahan pupuk lokal menjadi pupuk NPK tidak diperkenankan untuk diekspor maupun diimpor dengan tujuan menjaga kualitas yang seragam dan menjaga persediaan untuk petani pada setiap musim tanam.
 - f. Keunggulan dari segi produktivitas petani dan pekerja di negara Thailand karena memiliki etos kerja yang tangguh serta mampu bekerja dalam jangka waktu yang lebih lama dari rata-rata petani/pekerja pada umumnya.
 - g. Pemerintah Thailand mampu menjaga harmonisasi antar pasar pertanian dan pasar industri. Semua pihak yang berkontribusi penting dalam proses distribusi, dapat saling menunjang dengan keberadaan pasar agrobisnis yang terdiri dari pasar induk, pasar regional, pasar kontrak serta pasar lelang yang dapat bekerja sesuai dengan mekanisme pasar.
2. Negara India:
 - a. Pengembangan infrastruktur khususnya

- irigasi
 - b. Fasilitas kredit dengan bunga rendah
 - c. Penggunaan bibit unggul hibrida
 - d. Penyediaan peralatan pertanian biaya murah
 - e. Pengembangan industri pengolahan makanan
 - f. Pembinaan petani dengan pemanfaatan informasi telekomunikasi
 - g. Pengembangan koperasi
3. Negara Jepang:
- a. Keseimbangan antara industrialisasi dan pembangunan pertanian
 - b. Menjaga sumber daya pertanian khususnya lahan pertanian potensial dan generasi muda pertanian
 - c. Penelitian dan pengembangan pertanian pengupayakan agar pertanian menjadi sektor yang lebih menarik

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk dapat mengurangi pengiriman TKI di sektor informal (tidak berbadan hukum) yang dipandang beresiko tinggi karena tingkat perlindungan yang minim. Bukanlah hal yang mudah bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi TKI yang bekerja di sektor yang tidak berbadan hukum karena berkaitan dengan hukum yang berlaku di negara tujuan. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengiriman TKI di sektor informal banyak menuai kontra karena di satu sisi TKI dianggap salah satu pahlawan devisa. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pengiriman TKI di sektor formal (berbadan hukum) yang memiliki tingkat perlindungan tinggi, sehingga TKI tetap dapat menjadi pahlawan devisa.

TKI yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, akan lebih sulit untuk bisa memasuki lapangan kerja di sektor formal baik di dalam maupun di luar negeri. Pengembangan agroindustri merupakan salah satu upaya yang dapat dipilih untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Daerah kantong TKI khususnya di Jawa Barat, sektor pertanian masih merupakan sektor unggulan sehingga potensial bagi pengembangan agroindustri. Pengembangan agroindustri di kantong TKI diharapkan dapat memberikan alternatif lain bagi masyarakat untuk mendapat pekerjaan atau mengembangkan usaha secara mandiri selain memilih untuk bekerja di luar negeri di sektor informal.

Pengembangan agroindustri yang berbasis

pada komoditi unggulan dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat di daerah pertanian. Pandangan generasi muda terhadap kehidupan petani yang tidak menjanjikan dapat secara perlahan berubah ketika mereka dapat mengembangkan usaha dibidang pertanian atau bekerja di industri pengolahan hasil pertanian, tidak lagi hanya bekerja sebagai buruh tani. Berkembangnya agroindustri berdampak pada meningkatnya perekonomian di daerah kantong-kantong TKI. Begitu pula lapangan kerja di dalam negeri akan semakin terbuka dengan tingkat penghasilan yang lebih tinggi sehingga minat masyarakat untuk mencari kerja di luar negeri di sektor informal akan berkurang.

Diperlukan dukungan dari pemerintah yang dituangkan dalam bentuk perencanaan jangka menengah dan panjang, kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta payung hukumnya untuk mendukung pengembangan agroindustri khususnya di daerah Kantong TKI. Tuntutan untuk menghasilkan produk agroindustri yang berkualitas tidak mungkin dapat dipenuhi oleh pelaku agroindustri tanpa dukungan pemerintah yang nyata. Kebijakan negara lain yang telah berhasil mendorong pengembangan agroindustri dapat dijadikan pelajaran yang berharga dan pemerintah dapat mengadopsi kebijakan-kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

KESIMPULAN

Sektor pertanian masih merupakan sektor handal untuk dapat menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah di daerah Kantong TKI. Tetapi, sektor ini tidak menarik untuk generasi muda karena dianggap tidak dapat memberikan penghasilan yang memadai dan kurang bergensi dibandingkan lapangan pekerjaan di sektor lain di dalam negeri maupun lapangan kerja di luar negeri. Pengembangan agroindustri di daerah Kantong TKI diharapkan dapat memperbaiki citra "Petani" yang selama ini dipandang hanya sebagai buruh tani. Berkembangnya agroindustri di daerah-daerah yang kaya akan komoditi unggulan berdampak pada dikenalnya petani sebagai pengusaha di sektor pertanian. Bercermin kepada pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam pengembangan agroindustri, dukungan pemerintah sangat penting dalam memberikan fasilitas dan dukungan kepada petani untuk dapat mengembangkan agroindustri.

Daftar Pustaka

- Arumsari, V., & Syamsiar, S. (2011). Pemberdayaan masyarakat pedesaan berbasis agroindustri pangan lokal (Suatu kajian agroindustri gula kelapa kristal di kecamatan kokap Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 8(1), 35–41.
- BNP2TKI. (2019). Statistik Perlindungan dan Penempatan. Retrieved from <http://www.bnp2tki.go.id/statistik-penempatan>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2006). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Media Global Edukasi.
- Dabukke, F. B. M., & Iqbal, M. (2016). Kebijakan pembangunan pertanian Thailand, India, dan Jepang serta implikasinya bagi Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 12(2), 87–101. <https://doi.org/10.21082/akp.v12n2.2014.87-101>
- Dhiman, P. K., & Rani, A. (2011). Problems and prospects of small scale agro based industries: An analysis of Patiala district. *International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 129–142.
- Djamudin, Fauzi, A. M., Arifin, H. S., & Sukardi. (2012). Studi pengembangan agroindustri dan agrowisata terpadu di daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi Kabupaten Bogor. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 22(3), 151–163.
- Halil. (2003). Strategi agroindustrialisasi di daerah pedesaan: Kasus pengembangan agroindustri ubi kayu di pedesaan Lombok. *Crop Agro : Jurnal Ilmiah Budidaya Pertanian*, 3(2), 134–151.
- Maharani, E., Edwina, S., & Kusumawaty, Y. (2010). Strategi pengembangan agroindustri nata de coco di Kabupaten Indragiri Hilir. *Indonesian Journal of Agricultural Economics*, 1(1), 75–86.
- Marimin, & Muspitawati, H. (2002). Kajian strategi peningkatan kualitas produk industri sayuran segar (Studi kasus di sebuah agroindustri sayuran segar). *Jurnal Teknologi Dan Industri Pangan*, 13(3), 224–233.
- Mirah, A. D. (2008). Model I'SWOT bagi perumusan strategi pengembangan agroindustri unggulan wilayah di Sulawesi Utara. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 18(1), 13–23.
- Nuraeni, Y. (2018). Analisis Sektor Unggulan di Daerah Kantong TKI dengan Menggunakan Metode Location Quotient (LQ) dan Shift Share (Studi Kasus Daerah Kantong TKI di Provinsi Jawa Barat). In *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST) 2018*. Yogyakarta: IST Akprind Yogyakarta.
- Setyowati, N. (2012). Analisis potensi agroindustri olahan singkong di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Informasi Dan Kewirausahaan*, 1(3), 179–185. Retrieved from <http://journal.uui.ac.id/index.php/ajie/article/view/7000>
- Silva, R., & Riadi, R. M. (2006). Pengaruh pembangunan perkebunan kelapa sawit terhadap ekonomi regional daerah Riau. *Sorot*, 1(1), 31–36.
- Sinaga, B. M., & Susilowati, S. H. (2007). Dampak kebijakan ekonomi di sektor agroindustri terhadap distribusi pendapatan sektoral, tenaga kerja dan rumahtangga di Indonesia: analisis sistem neraca sosial ekonomi. *SOCA : Jurnal Sosial, Ekonomi Pertanian*, 7(2), 1–19.
- Soejono, D. (2011). Strategi pengembangan agribisnis dan agroindustri sub sektor tanaman pangan di Kabupaten Situbondo. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (J-SEP)*, 5(3), 54–60.
- Syam, H., & Ma'arif, M. S. (2004). Kajian perlunya kebijakan pengembangan agroindustri sebagai leading sector. *Agrimedia*, 9(1), 32–39.
- Syam, H., Ma'arif, M. S., Eriyatno, Sailah, I., Machfud, & Didu, M. S. (2006). Rancang bangun model strategi sistem penunjang keputusan pengembangan agroindustri berbasis kakao melalui pola jejaring usaha. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 16(1), 18–27.
- Wijayanti, I. K. E., Ethika, N. D., & Widyarini, I. (2007). Prospek pengembangan agroindustri minuman lidah buaya di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. *SOCA : Jurnal Sosial, Ekonomi Pertanian*, 7(3), 1–16.
- Yulianti, & Sari, N. (2008). Kelayakan usaha agroindustri bawang goreng Palu di Kabupaten Donggala. *Agroland*, 15(3), 216–222.